



RENCANA STRATEGIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022-2024



FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Tim Penyusun

2023

KATA SAMBUTAN

Untuk mewujudkan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang (UNP) menjadi fakultas unggul yang bermartabat dan bereputasi internasional sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, Rencana Strategis (Renstra) perlu disusun secara cermat dalam rangka mendukung tercapainya tujuan fakultas dan universitas.

Renstra FK UNP tahun 2022-2024 disusun dengan berpedoman kepada Renstra UNP dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2020-2024. Renstra FK UNP tahun 2022-2024 merupakan bagian integral dari pengembangan FK UNP secara keseluruhan. Renstra ini merupakan renstra perdana dan merupakan pedoman pelaksanaan program kerja Dekanat 2 tahun ke depan serta pedoman penyusunan Renstra dan program kerja Fakultas dan unit-unit di lingkungan FK Universitas Negeri Padang maupun pihak lain yang memerlukan informasi tentang Renstra FK UNP. Mudah-mudahan Renstra ini dapat dipedomani dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Padang, 2023
Dekan

Dr.dr. Rika Susanti, Sp.FM(K)

LEMBAR PENGESAHAN

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG PERIODE TAHUN
2022-2024**

Dekan,

Dr. dr. Rika Susanti, Sp.FM(K)

Wakil Dekan 2,

dr. Pudia M Indika M.Kes,AIFO-K

SK DEKAN TENTANG RENSTRA FK



KEPUTUSAN PIL DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Nomor : 64/UN35.10/TU/2023

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN 2023 - 2024

Pil. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

- Menimbang :
- Bahwa untuk pencapaian visi dan misi dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang, maka dipandang perlu menetapkan Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang 2023-2024 .
 - Bahwa sebagaimana dimaksud dalam butir (a), perlu penetapan keputusan Pil. Dekan tentang Penetapan Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang 2023-2024.
- Mengingat :
- Undang undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 114 Tahun 2021 tentang Tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
 - Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Tahun 2022 Tentang Fakultas Pada Universitas Negeri Padang.
 - Peraturan Rektor No 14 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor;
 - Keputusan Rektor Nomor:1177/UN35/AK/2022 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.
 - Keputusan Rektor No 1323/UN35/KP/2022 tentang Pengangkatan Pil. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang
 - Keputusan Pil. Dekan Nomor: 41/UN35.10/TU/2023 tentang Penetapan Visi dan Misi Fakultas dan Program Studi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang Tahun 2023-2024**

Pertama : Keputusan ini sebagaimana dikeluarkan sebagai penetapan Renstra Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang 2023-2024.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 4 April 2023
Pil. Dekan FK-UNP



Dr. dr. Rika Susanti, Sp. FM(K)
NIP. 197607312002122002

Tembusan:
- Rektor UNP
- Kepala BUK UNP

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	2
LEMBAR PENGESAHAN.....	3
SK DEKAN TENTANG RENSTRA FK.....	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	7
BAB I.....	10
PENDAHULUAN.....	10
1.1. LATAR BELAKANG.....	10
1.2. SEJARAH.....	11
1.3. ANALISIS SITUASI.....	15
1.4. ANALISIS SWOT.....	26
1.5. KEKHUSUSAN.....	28
1.6. UNIT PENDUKUNG.....	29
1.7. SINERGISME INTERNAL DAN EKSTERNAL.....	32
BAB 2.....	35
VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	35
2.1 VISI.....	35
2.2. MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN.....	35
2.3. MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN.....	35
2.4. TATA NILAI.....	36
2.5. TUJUAN.....	38
2.6. SASARAN PROGRAM STUDI.....	39
2.8. KEBIJAKAN MUTU.....	40
BAB 3.....	44
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	44
3.1. ARAH KEBIJAKAN.....	44
3.2. STRATEGI.....	45
3.3. KERANGKA REGULASI.....	45
3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN.....	46
BAB 4.....	47
TARGET KINERJA DAN INDIKATOR.....	47
4.1. TARGET KINERJA.....	47
PENUTUP.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perguruan Tinggi di LLDIKTI Wilayah X yang mempunyai Prodi Kedokteran	16
Tabel 2. Jumlah Penerimaan Mahasiswa SNBT dan SNBP Kedokteran Hewan tahun 2020-2022	21
Tabel 3. Wahana Pendidikan Program Studi Kedokteran	29
Tabel 4. Data Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	30
Tabel 5. Wahana Praktik Kedokteran Hewan	30
Tabel 6. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Tambahan	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Periode Perkembangan UNP	9
Gambar 2. Fakultas di Universitas Negeri Padang	10
Gambar 3. Grafik Jumlah Tenaga Kesehatan di Asia Tenggara Per 100.000 Penduduk	13
Gambar 4. Relevansi di Sektor Kesehatan	13
Gambar 5. Peta Bencana Indonesia 2021	14
Gambar 6. Peta Index Rawan Bencana Indonesia Tahun 2021	15
Gambar 7. Statistik jumlah ternak Provinsi Sumatera Barat 2020- 2022	18
Gambar 8. Analisis SWOT Prodi Kedokteran	23
Gambar 9. Analisis SWOT Prodi Kedokteran Hewan	24
Gambar 10. Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang	26
Gambar 11. Prinsip pelaksanaan siklus SPMI	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pendidikan adalah usaha untuk memanusiakan manusia dengan menumbuh kembangkan potensinya. Pendekatan sistem adalah salah satu upaya yang menyeluruh untuk menyelenggarakan pendidikan di berbagai tahap. Tujuan dari pendekatan sistem tersebut adalah untuk memaksimalkan pemenuhan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan di masing-masing tahap pendidikan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan untuk kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan kedokteran merupakan salah satu sistem pendidikan yang kompleks dan terstruktur dengan tujuan untuk menghasilkan dokter yang kompeten. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran menjelaskan bahwa pendidikan kedokteran sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk menumbuh kembangkan penguasaan, pemanfaatan, penelitian, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran. Tujuan pendidikan kedokteran salah satunya adalah menghasilkan dokter yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompoten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanistik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi.

Kebutuhan dokter dan dokter hewan di Indonesia semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Kebutuhan dokter dapat dipenuhi dari institusi penyelenggara pendidikan kedokteran yang dikelola oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta. Saat ini di Sumatra Barat terdapat dua fakultas kedokteran yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (Perguruan Tinggi Negeri) dan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah (Perguruan Tinggi Swasta).

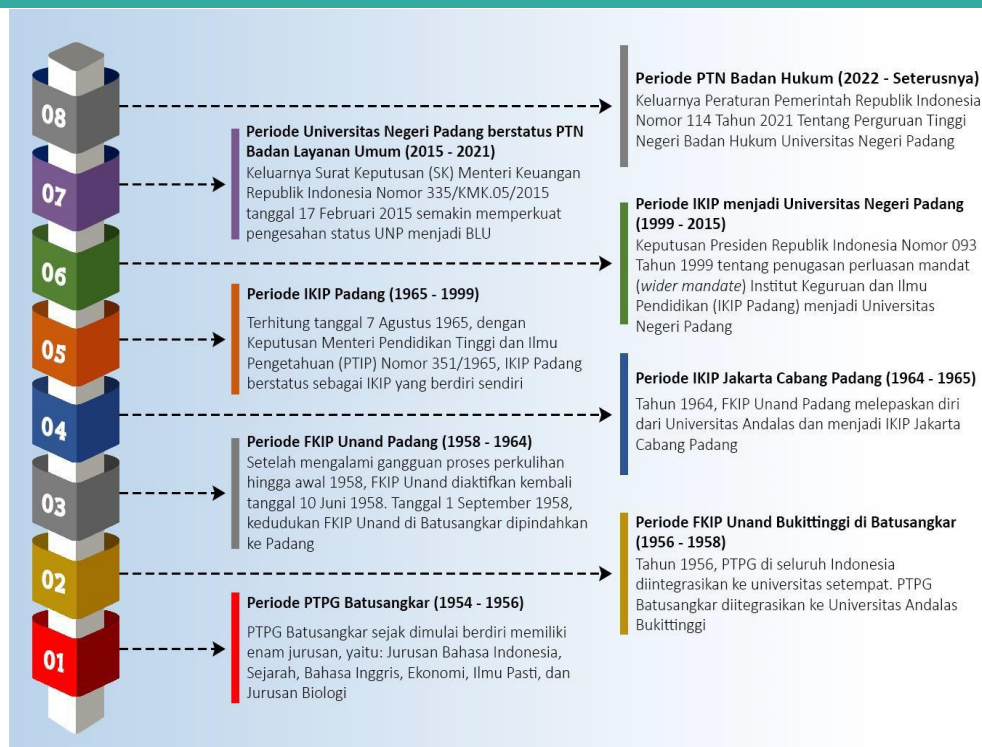
Universitas Negeri Padang (UNP) telah bertransformasi menjadi salah satu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia per 25 November 2021 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 dan akan terus memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan nasional. Dorongan dalam pembentukan Program Studi Kedokteran dan Fakultas Kedokteran akan memberikan langkah konkrit UNP sebagai satuan pendidikan yang ikut serta dalam pembangunan kesehatan berkelanjutan secara menyeluruh.

Sejak tahun 2018 hingga saat ini, Rektor UNP melalui Tim *Task Force* berupaya menyusun berbagai kebutuhan dan kelengkapan dalam penyusunan proposal pengajuan pendirian Program Studi Kedokteran kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Barat telah memberikan rekomendasi pembukaan Program Studi Kedokteran UNP dengan memfasilitasi penyediaan rumah sakit pendidikan utama yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Mochtar Bukittinggi. Universitas Andalas sebagai universitas negeri yang sudah memiliki fakultas kedokteran yang terakreditasi unggul, turut memfasilitasi pendirian Program Studi Kedokteran UNP dengan menjadi fakultas kedokteran pembina.

Setelah berdirinya Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Negeri Padang, Rektor UNP menugaskan Tim *Task Force* untuk menyusun berbagai kebutuhan dan kelengkapan untuk pendirian Program Studi Kedokteran Hewan yang nantinya diajukan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Fakultas Kedokteran UNP sebagai induk Program Studi Kedokteran Hewan juga sudah melakukan kerjasama dengan beberapa instansi seperti Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Barat, Rumah Potong Hewan Bukittinggi (RPH), Balai Veteriner Bukittinggi, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mengatas, Kebun Binatang Kinantan Bukittinggi, Moosa Farm Kabupaten Solok dan Puskesmas Tanah Datar. Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai universitas negeri yang telah memiliki Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) yang terakreditasi unggul menjadi pendamping pendirian dan penyelenggaraan Prodi Kedokteran Hewan UNP.

1.2. SEJARAH

Universitas Negeri Padang merupakan salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), yang lahir dari kebijakan perluasan mandat (*wider mandate*) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) seluruh Indonesia. Sejak didirikan tanggal 23 Oktober 1954, UNP mengalami perubahan nama, tempat, kedudukan, status, serta program-program studi. Perubahan yang dilalui UNP dapat diklasifikasikan dalam delapan periode, yang terlihat dalam Gambar 1.

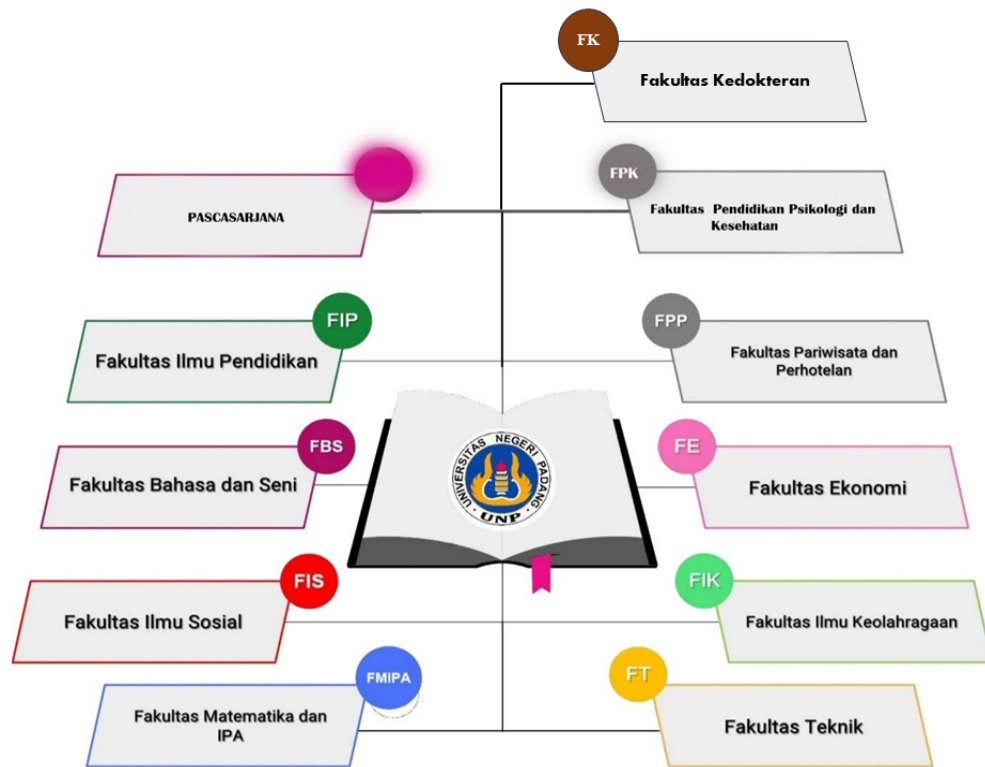


Gambar 1. Periode Perkembangan UNP

Salah satu bukti pengembangan kelembagaan adalah berkembangnya Jurusan Pendidikan Ekonomi pada Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial menjadi Fakultas Ekonomi dengan 6 (enam) Program Studi yaitu Magister Manajemen, Magister Ilmu Ekonomi, Pendidikan Ekonomi, Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Akuntansi. Begitu juga pada Fakultas Teknik, mengajukan Jurusan Manajemen Perhotelan menjadi Fakultas Pariwisata dan Perhotelan dengan 5 Program Studi, yaitu: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Tata Busana, Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan, Tata Boga, dan Manajemen Perhotelan. Pada tahun 2021 SOTK Universitas Negeri Padang mengalami perkembangan kembali berdasarkan Permendikbud Ristek RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang OTK UNP. Perkembangan ini menjadikan UNP memiliki 9 (sembilan) fakultas dan 1 (satu) sekolah pascasarjana. Sembilan fakultas yang ada di Universitas Negeri Padang berdasarkan Permendikbud Ristek RI Nomor 26 Tahun 2021 yaitu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; Fakultas Teknik; Fakultas Ilmu Keolahragaan; Fakultas Ilmu Pendidikan; Fakultas Bahasa dan Seni; Fakultas Ilmu Sosial; Fakultas Ekonomi; Fakultas Pariwisata dan Perhotelan; dan Fakultas Pendidikan Psikologi dan Kesehatan. Selain itu, melalui Surat Keputusan Rektor UNP Nomor 44/UN35/KP/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi S2 dan S3 di UNP, diberikan kesempatan kepada fakultas dan program studi untuk mengembangkan pendidikan Pascasarjana yang bersifat monodisiplin dan multidisiplin di fakultas masing-masing tanpa harus bergabung dengan Program Pascasarjana UNP yang membina program multidisiplin.

Fakultas yang ada di UNP berdasarkan Permendikbud Ristek RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang OTK UNP mempunyai 10 (sepuluh) fakultas dan sekolah pascasarjana setara fakultas. Pada tanggal 12 Desember 2022, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang berdiri melalui

SK Rektor Nomor 1177/UN35/AK/2022 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang, terlihat dalam Gambar 2.



Gambar 2. Fakultas di Universitas Negeri Padang

Pengusulan Program Studi Kedokteran UNP dimulai pada tahun 2018 dengan membentuk Tim *Task Force* Program Studi Kedokteran UNP Melalui SK Rektor UNP Nomor 589/UN35/Kp/2018, beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan:

- 1) Pembentukan Tim *Task Force* Kedokteran UNP oleh Rektor Prof. Ganefri, Ph.D. tanggal 4 Oktober 2018 dengan SK Rektor Nomor 589/UN35/Kp/2018.
- 2) *Focus Group Discussion* (FGD) FK UI, FK UNAND, *Stakeholder* Rumah Sakit, Dinas Kesehatan se-Sumatra Barat tanggal 3 Desember 2018.
- 3) Penandatanganan MOA UNP-IDI Wilayah Sumbar tanggal 5 Desember 2018
- 4) Pelatihan Komisi Etik Penelitian Kesehatan UNP di Surabaya tanggal 9 Januari 2019.
- 5) *Benchmarking* dengan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA tanggal 24 Januari 2019.
- 6) Audiensi dengan Konsil Kedokteran Indonesia tanggal 29 Juni 2019.
- 7) *Benchmarking* dengan Fakultas Perubatan UKM Malaysia tanggal 19 September 2019.
- 8) Audiensi dengan Dirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta tanggal 11 November 2020.
- 9) *Focus Group Discussion* dengan FK UNDIKSHA secara daring pada tanggal 26 Februari 2022.
- 10) Penetapan Tim Pembina melalui SK Dekan FK Universitas Andalas Tanggal 14 Maret 2022.
- 11) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan RSAM Bukittinggi sebagai Rumah Sakit

Pendidikan tanggal 4 April 2022.

- 12) Audiensi dengan Konsil Kedokteran Indonesia secara daring tanggal 11 April 2022.
- 13) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan FK UNAND tanggal 23 Mei 2022.
- 14) Audiensi dengan Konsil Kedokteran Indonesia di Jakarta tanggal 16 Juni 2022.
- 15) *Focus Group Discussion* dengan Pembina FK UNAND di Bukittinggi pada tanggal 17-19 Juni 2022.
- 16) *Focus Group Discussion* dengan Dirjen Nakes Kemenkes RI di Rektorat UNP tanggal 18 Juli 2022.
- 17) Visitasi Dirjen Nakes Kemenkes RI di Kampus Bukittinggi tanggal 21-22 Agustus 2022.
- 18) *Focus Group Discussion* dengan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia di Rektorat UNP tanggal 10 Oktober 2022.
- 19) *Focus Group Discussion* Revisi Borang terkait kekhususan yang baru Program Studi Kedokteran UNP bersama narasumber dan tim pembina di Hotel UNP tanggal 27-30 Oktober 2022
- 20) *Desk Evaluation* Program Studi Kedokteran UNP oleh KKI tanggal 9 November 2022.

Program Studi Kedokteran Hewan merupakan program studi yang akan berada di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang. Pembentukan Program Studi Kedokteran Hewan UNP ini telah tercantum dalam rencana strategis Universitas Negeri Padang 2020 - 2024. Pengusulan dimulai pada tahun 2023 dengan membentuk Tim *Task Force* Program Studi Kedokteran Hewan UNP Melalui SK Rektor UNP Nomor 1038/UN35/KP/2023, beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan:

- 1) Penjajakan kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung dan 3 UPT Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Sijunjung pada tanggal 14 Juli 2023.
- 2) Audiensi Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Sumatera Barat dengan Universitas Negeri Padang pada tanggal 31 Juli 2023.
- 3) Focus Group Discussion (FGD) bersama SKHB IPB pada tanggal 3-4 Agustus 2023.
- 4) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama untuk pendampingan pendirian Program Studi Kedokteran Hewan dengan SKHB IPB pada tanggal 11 Agustus 2023.
- 5) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat pada tanggal 11 Agustus 2023.
- 6) Wawancara dengan Calon Dosen Prodi Kedokteran Hewan UNP pada tanggal 15 Agustus 2023
- 7) FGD Tim Task Force Prodi Kedokteran Hewan UNP untuk Penyusunan Naskah Akademik Prodi Kedokteran Hewan UNP, pada tanggal 21-23 Agustus 2023.
- 8) Penandatanganan MOA FK UNP dengan FKH UGM pada tanggal 31 Agustus 2023 di Yogyakarta
- 9) Presentasi Naskah Akademik oleh Tim Pendirian Prodi Kedokteran Hewan UNP di Hadapan Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI)
- 10) Kunjungan Tim Pendirian Prodi Kedokteran Hewan UNP ke SKHB IPB University
- 11) FGD penyusunan kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) bersama SKHB IPB

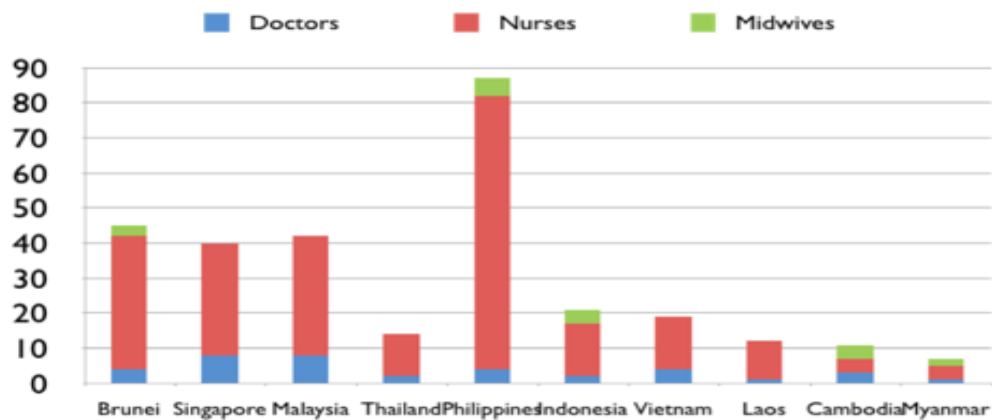
pada tanggal 4-6 Oktober 2023.

- 12) Visitasi pendirian Prodi Kedokteran Hewan UNP oleh Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI) pada tanggal 16 Oktober 2023.
- 13) Penyerahan rekomendasi PB PDHI untuk pendirian Prodi Kedokteran Hewan FK UNP pada Selasa, 17 Oktober 2023.
- 14) Penandatangi MoU antara FK UNP dengan Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat pada tanggal 1 November 2023.
- 15) Penandatangi MoU antara FK UNP dengan Klinik Paw's Vet pada tanggal 1 November 2023.
- 16) Rapat senat Komisi II Senat Akademik Universitas (SAU) UNP dengan Tim Task Force pendirian Prodi Kedokteran Hewan di ruang sidang senat UNP pada tanggal 3 November 2023.
- 17) Rekomendasi SAU untuk pendirian Prodi Kedokteran Hewan UNP pada tanggal 6 November 2023
- 18) Pengusulan Borang Pendirian Prodi Kedokteran Hewan UNP ke LAM-PTKes pada tanggal 6 November 2023
- 19) Penandatangi MoA antara FK UNP dan FK UNRI pada tanggal 10 November 2023.
- 20) Penyerahan rekomendasi Prodi Kedokteran Hewan UNP dari Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKI) oleh Ketua AFKHI pada tanggal 14 November 2023.
- 21) FGD Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) oleh Tim Task Force pendirian Prodi Kedokteran Hewan UNP pada tanggal 14-15 November 2023.
- 22) Benchmarking online Program Studi Kedokteran Hewan FK UNP dengan Fakultas Kedokteran Hewan University of Putra Malaysia pada tanggal 22 November 2023.
- 23) Penandatangi Nota Kesepahaman (MoU) FK UNP dengan PDHI Cabang Sumatera Barat pada tanggal 23 November 2023.
- 24) Penandatangi Nota Kesepahaman (MoU) FK UNP dengan Klinik Hewan Univet pada tanggal 23 November 2023.
- 25) Penandatangi MoU antara FK UNP dengan CV Gunung Nago Farm Group pada tanggal 24 November 2023.
- 26) Rapat persiapan untuk visitasi LAM-PTkes dan Sosialisasi Mutu oleh Tim Penjaminan Mutu Fakultas dengan Tim Task Force pendirian Prodi Kedokteran Hewan UNP pada tanggal 28 November 2023.

1.3. ANALISIS SITUASI

a) Program Studi Kedokteran

Strategi Global World Health Organization (WHO) terhadap sumber daya manusia dalam bidang kesehatan salah satunya adalah mengantisipasi kebutuhan tenaga kesehatan di masa mendatang pada tahun 2030 serta merencanakan perubahan yang diperlukan. Asia Tenggara sebagai salah satu wilayah dengan jumlah penduduk yang besar juga berupaya menghadapi tantangan kebutuhan tenaga kesehatan tersebut. Gambaran tenaga kesehatan di Asia Tenggara pada tahun 2021 terlihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Grafik Jumlah Tenaga Kesehatan di Asia Tenggara Per 100.000 Penduduk
(Kemenkes RI, 2021)

Berdasarkan grafik di atas, Indonesia masih kekurangan tenaga kesehatan khususnya dokter jika dibandingkan negara di Asia Tenggara lainnya yaitu Brunei, Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Filipina. Pembangunan sumber daya manusia bidang kesehatan, berdasarkan pemetaan terhadap *supply and demand*, serta relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan kerja, menjadi dasar pembukaan program studi kedokteran. Relevansi pendidikan tinggi terhadap kebutuhan kerja di sektor kesehatan terlihat di Gambar 4.



Gambar 4. Relevansi di Sektor Kesehatan

Sumber: Konvensi Nasional Pendidikan INDONESIA (KONASPI IX) Tahun 2019

Menurut WHO, jumlah dokter dibandingkan dengan jumlah penduduk idealnya memiliki rasio 1:1.000. Menurut data Kemenkes RI tahun 2022, jumlah dokter di Indonesia dibandingkan jumlah penduduk adalah 0,37 dokter per 1.000 penduduk. Data ini menunjukkan bahwa kebutuhan Indonesia akan tenaga dokter masih sangat besar. Untuk mencukupi kebutuhan nasional, Indonesia masih membutuhkan 172.508 tenaga dokter. Sumatra Barat memiliki dokter sebanyak 2.234 orang, dengan rasio 0,4:1.000 penduduk. Kondisi ini menunjukkan masih kurangnya jumlah dokter dibandingkan dengan penduduk Sumatra Barat yang berjumlah 5.565.400 orang. Untuk memenuhi standar WHO, Sumatra Barat masih membutuhkan 3.321 orang dokter.

Secara geografis, Provinsi Sumatra Barat terletak pada garis 0°54'LU—3°30'LS dan 98°36'BT—101°53'BT dengan total luas wilayah sekitar 42.297,30km² atau 4.229.730Ha, termasuk ±391 pulau besar dan kecil di sekitarnya. Secara administratif, wilayah Provinsi Sumatra Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatra Utara (utara), Provinsi Bengkulu (selatan), Provinsi Riau dan Jambi (timur), serta Samudera Hindia (barat).

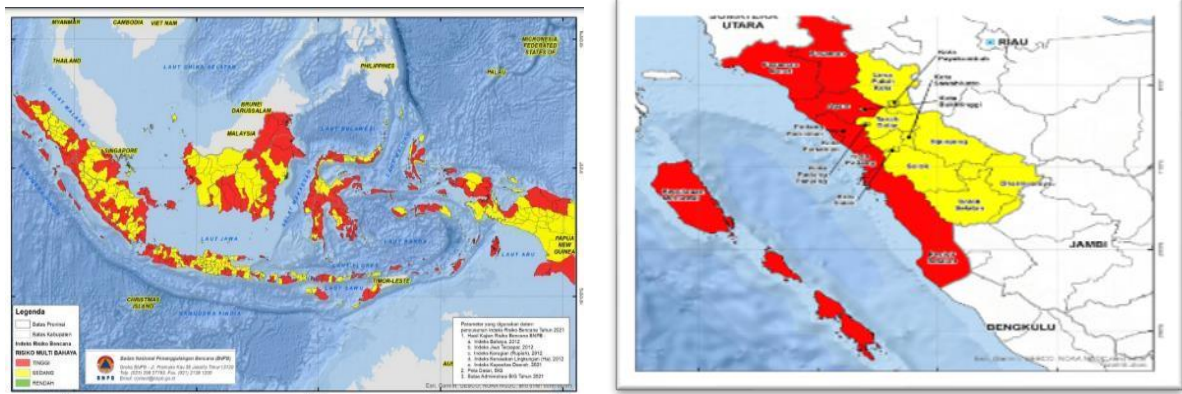
Bencana dapat didefinisikan dalam berbagai arti baik secara normatif maupun pendapat para ahli. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Menurut Permenkes RI Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan, berdasarkan penyebabnya bencana dibagi atas 3 yaitu bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial.

Indonesia adalah lumbung bencana alam dikarenakan kondisi geografisnya. Menurut data BNPB sepanjang tahun 2021 telah terjadi 5.204 kejadian bencana alam di seluruh Indonesia. Dampak bencana alam ini mengakibatkan 728 orang meninggal dunia, 87 orang hilang, 7.630.692 terdampak menderita dan mengungsi, serta 14.915 orang mengalami luka-luka. Selain itu juga terdapat kerugian material dan dampak psikologis karena bencana alam (terlihat di Gambar 5).



Gambar 5. Peta Bencana Indonesia 2021 (BNPB, 2021)

Sebagai daerah yang rawan bencana alam berdasarkan data BNPB tahun 2021, Sumatra Barat memiliki indeks risiko bencana nasional dengan *rate* 147,36; sehingga Sumatra Barat termasuk ke dalam 11 provinsi dengan risiko bencana tertinggi. Ancaman bencana antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, dan abrasi serta kebakaran hutan dan lahan.



Gambar 6. Peta Index Rawan Bencana Indonesia Tahun 2021 (BNPB, 2021)

Provinsi Sumatra Barat merupakan daerah rawan gempa bumi baik gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Hal ini terkait dengan kondisi fisik Pulau Sumatra sebagai *Great Sumatra Fault* di sepanjang pesisir barat Sumatra dan *Mentawai Fault* di Kepulauan Mentawai yang saling mendesak sehingga terjadi gerakan di lempeng besar dan *micro plate*. Dengan kondisi geografis di atas maka Sumatra Barat menjadi salah satu daerah yang rawan bencana dan berada di wilayah yang memiliki *Seven Segmen* gempa yang saling berangkai antara satu segmen dengan segmen yang lainnya. Berdasarkan catatan dan periodenisasi bencana gempa, Sumatra Barat memiliki siklus periodenisasi 200 tahun-an. Begitu juga dengan gempa di daratan dengan periodenisasi yang relatif lebih pendek antara 40 tahun-an hingga 70 tahun-an. Dalam satu abad terakhir setidaknya tercatat pernah terjadi 20 kali gempa besar (Gambar 6).

Pada tanggal 30 September 2009 terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,6 Skala Richter di lepas pantai Sumatra Barat. Gempa menyebabkan kerusakan parah di beberapa wilayah di Sumatra Barat seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Solok, dan Kabupaten Pasaman Barat. Menurut data Satkorlak Penanggulangan Bencana, sebanyak 1.117 korban meninggal, korban luka berat mencapai 1.214 orang, luka ringan 1.688 orang. (Sumber: BPBD Kota Padang). Akibat pasca gempa tersebut muncul berbagai masalah kesehatan antara lain penyakit infeksi, trauma fisik serta psikis yang menyebabkan korban membutuhkan penanggulangan terintegrasi dan multidisiplin. Penanggulangan masalah kesehatan pasca gempa ini membutuhkan komitmen dan upaya yang konsisten dan berkesinambungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, karena besarnya potensi bencana alam di Indonesia khususnya di Sumatra Barat maka diperlukan upaya manajemen risiko kesehatan bencana alam yang konsisten dan berkesinambungan. Oleh karena UNP mendirikan Fakultas Kedokteran dengan karakteristik penanggulangan masalah kesehatan terkait bencana alam. Potensi peminat fakultas kedokteran di Sumatra Barat sangat tinggi dan keberadaan kedua Fakultas Kedokteran yang ada belum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini terlihat dari data peminat di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2022 melalui jalur SBMPTN masih sangat tinggi

dengan rasio 1:22 (jumlah peminat 2.756 sedangkan yang diterima 100 orang), melalui jalur SNMPTN masih sangat tinggi dengan rasio 1:27 (jumlah peminat 1.343 sedangkan yang diterima 50 orang) dan jalur Mandiri dengan rasio 1:27 (jumlah peminat 3.255 sedangkan yang diterima 119 orang). (Sumber: Daftar peminat UNAND). Kondisi ini menunjukkan animo masyarakat untuk masuk kedokteran masih tinggi dengan *trend* peningkatan yang diprediksi akan selalu bertambah. Data sebaran peminat fakultas kedokteran di wilayah kerja LLDIKTI Wilayah X dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Perguruan Tinggi di LLDIKTI Wilayah X yang mempunyai Prodi Kedokteran

No	Nama Perguruan Tinggi	Penerimaan Mahasiswa Tahun					
		2019		2020		2021	
		Peminat	Daya Tampung (%)	Peminat	Daya Tampung (%)	Peminat	Daya Tampung (%)
1.	Universitas Andalas	1087	6,90%	1240	6,05%	1277	5,87%
2.	Universitas Riau	854	4,22%	895	4,02 %	1288	2,80%
3.	Universitas Jambi	747	5,09%	720	3,47%	811	3,08%

Sumber: https://sidata-ptn.ltmtpt.ac.id/ptn_sb.php

Universitas Negeri Padang memilih Kota Bukittinggi sebagai lokasi pendirian fakultas kedokteran didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain:

- 1) Bukittinggi adalah salah satu kota dengan perekonomian terbesar di Sumatra Barat yang terletak di wilayah strategis sehingga mudah dijangkau dari berbagai kota/kabupaten dan provinsi tetangga.
- 2) Bukittinggi terletak di dataran tinggi yang dikelilingi hutan tropis sehingga cuaca di Kota Bukittinggi relatif sejuk (16-24°C) dan sangat kondusif untuk belajar.
- 3) Bukittinggi juga memiliki fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah Achmad Mochtar yang menjadi rumah sakit pendidikan utama bagi Fakultas Kedokteran UNP.

Saat ini di Sumatra Barat terdapat 2 (dua) fakultas kedokteran, yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang memiliki keunggulan menghasilkan lulusan yang bermartabat dan terkemuka terutama dalam bidang penyakit tidak menular; dan Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah memiliki keunggulan menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan berakhlakul kharimah dalam bidang geriatri.

Berdasarkan analisis kondisi demografi tenaga dokter yang masih kurang dan belum merata, kondisi geografi rawan bencana yang menimbulkan permasalahan kesehatan, keunggulan dari dua fakultas kedokteran yang sudah ada, serta tingginya peminat masuk fakultas kedokteran, maka UNP mendirikan fakultas kedokteran yang bertujuan menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di

tingkat nasional dan internasional. Dokter lulusan FK UNP akan menjadi *leader* dalam menanggulangi masalah kesehatan terkait bencana alam.

b) Program Studi Kedokteran Hewan

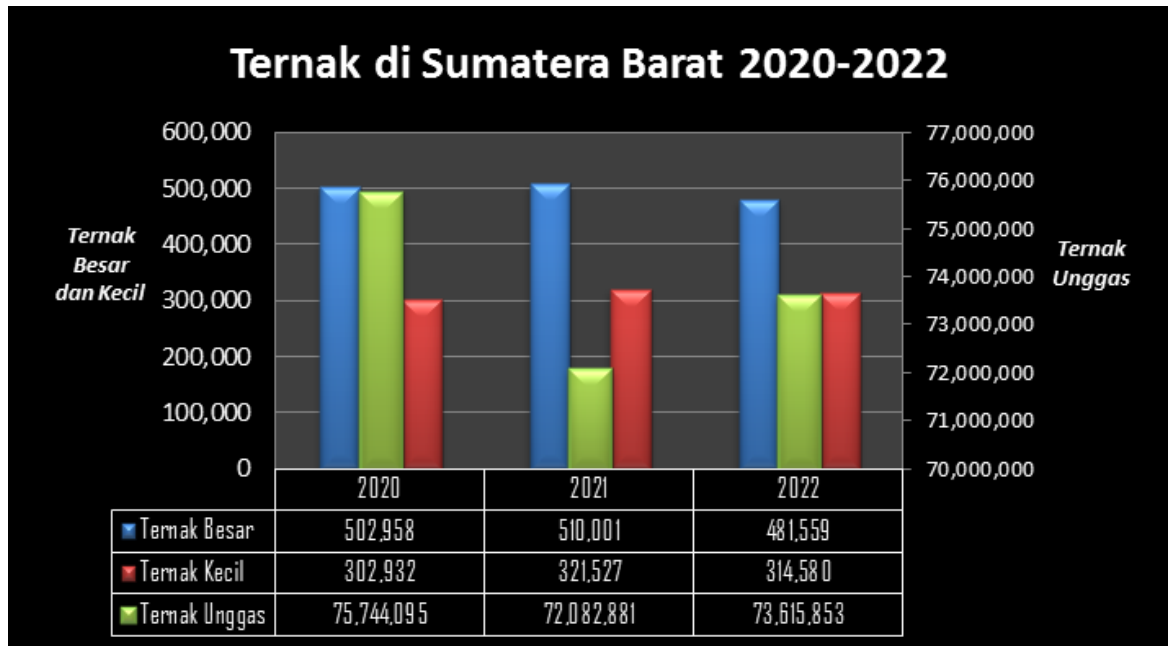
Kebutuhan dan ketersediaan dokter hewan di Indonesia masih belum seimbang. Berdasarkan data dari Pengurus Besar PDHI Pusat, sektor peternakan di Indonesia memerlukan sebanyak 50.000 dokter hewan. Angka ini akan terus bertambah setiap tahun sedangkan jumlah dokter hewan yang tersedia saat ini kurang dari 20.000 dokter hewan. Disisi lain, Indonesia memiliki 1.691 Puskesmas yang tersebar di seluruh daerah, akan tetapi hanya 21% kecamatan yang menyediakan fasilitas Puskesmas aktif (Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2020). Peraturan Menteri Pertanian nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan mencantumkan bahwa wilayah kerja Puskesmas meliputi satu sampai tiga kecamatan. Dengan demikian, jumlah ideal Puskesmas di Indonesia adalah sebanyak 3.547 unit, sehingga perlu tambahan lebih dari 1.800 unit Puskesmas. Sumatera Barat sendiri memiliki 61 Puskesmas, namun hanya 39 puskesmas yang memiliki tenaga dokter hewan. Bertambahnya jumlah Puskesmas di Indonesia termasuk di Sumatera Barat tentunya akan membutuhkan penambahan jumlah tenaga dokter hewan, khususnya di Sumatera Barat.

Pada tahun 2022, terdapat sekitar 1000 lulusan dokter hewan yang berasal dari 11 Fakultas Kedokteran Hewan di Indonesia. Kondisi ini akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk memenuhi kebutuhan dokter hewan di Indonesia jika hanya bergantung pada 12 Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) yang ada. Selain itu peluang timbulnya banyak permasalahan terkait penyakit hewan maupun kesehatan masyarakat serta terhambatnya pengembangan veteriner dapat terjadi.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan satu dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang sangat kekurangan jumlah dokter hewan sedangkan kabupaten ini memiliki ternak babi dengan jumlah yang sangat besar. Menurut laporan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, Kabupaten Kepulauan Mentawai membutuhkan penambahan dokter hewan yang memiliki wewenang untuk meningkatkan pelayanan kesehatan hewan di Puskesmas. Berdasarkan laporan tersebut, hal ini memungkinkan dilakukannya penerimaan mahasiswa untuk Prodi Kedokteran Hewan UNP melalui kerjasama antara pemerintahan daerah yang bersangkutan dengan Prodi Kedokteran Hewan UNP agar terpenuhinya kebutuhan dokter hewan di Kabupaten Kepulauan Mentawai maupun daerah terpencil lain di Sumatera Barat.

Provinsi Sumatera Barat berperan penting dalam sektor pertanian yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, salah satunya dalam subsektor peternakan yaitu ternak sapi (Dirjen Peternakan dan Keswan, 2020). Hal ini dikarenakan Sumatera Barat memiliki lahan yang luas dan pasokan pakan ternak yang memadai dalam hal jumlah dan kualitas. Sebagai contoh, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok, Kota Sawahlunto, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Payakumbuh, dan Agam yang telah ditetapkan oleh pemerintah Sumatera Barat sebagai basis unggulan dalam pemeliharaan ternak sapi (Indrayanti, 2022). Namun demikian, berdasarkan data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2022, jumlah ternak besar dan ternak kecil setiap tahun mengalami penurunan, khusus ternak unggas mengalami penurunan di tahun 2021 (Gambar 7). Hal ini bisa saja terjadi karena penurunan kesehatan hewan yang terkait dengan keterbatasan pelayanan kesehatan hewan sebagai akibat turunan dari minimnya ketersediaan dokter hewan di Sumatera Barat.



Gambar 7. Statistik jumlah ternak Provinsi Sumatera Barat 2020- 2022

Sumatera Barat juga merupakan salah satu provinsi etalase penyebaran penyakit hewan menular strategis (PHMS). Beberapa penyakit strategis pada hewan yang pernah merajalela di Sumatera Barat meliputi: Rabies, *Septicaemia Epizootica/SE*, *Newcastle Disease*, Jembrana, TBC, Anaplasma/Piroplasmosis, Surra, *Anthrax*, *Brucellosis*, Gumboro, *Hog cholera* dan Flu Burung/*Avian influenza*, dan *Foot & Mouth Disease* (FMD) atau Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Penyakit zoonosis menjadi perhatian khusus oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan karena berdampak pada kesehatan masyarakat. Salah satu penyakit zoonosis yang *trendnya* fluktuatif adalah rabies. Hasil dari *Press Conference* Kementerian Kesehatan RI (2023), mengumumkan bahwa terdapat 11 kasus kematian pada manusia yang diakibatkan oleh rabies. Hingga saat ini di Indonesia tercatat jumlah kasus gigitan hewan penular rabies sebanyak 31.113 kasus, dimana 95% kasus rabies disebabkan oleh gigitan anjing. Kejadian ini mengakibatkan kerugian secara ekonomi pada daerah tertular di antaranya biaya penyidikan, pengendalian yang tinggi, serta tingginya biaya perawatan pasca pajanan dan sampai sekarang belum ada obat yang efektif untuk pengobatan penyakit rabies.

Provinsi Sumatra Barat merupakan salah satu wilayah dari 24 provinsi di Indonesia yang endemis rabies dan masih sulit untuk menjadi wilayah bebas dari kasus rabies (Kemenkes RI, 2023). Data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tentang kasus rabies di Sumatera Barat pada tahun 2023 sebanyak 20 hewan positif rabies, diantaranya 18 anjing dan 2 kucing. Tingginya kasus rabies di Sumatera Barat umumnya berkaitan dengan

tradisi atau kebiasaan masyarakat berburu babi hutan menggunakan anjing. Tradisi buru babi atau kandiak di Ranah Minang diperkirakan sudah berlangsung sejak lama dan aktivitas berburu babi hampir ditemukan di semua daerah Sumatera Barat. Tujuan dan fungsi berburu babi awalnya untuk membantu para petani memberantas hama babi hutan yang merusak area pertanian dan perkebunan masyarakat. Akan tetapi, aktivitas berburu babi saat ini telah menjadi bagian dari hobi masyarakat yang biasanya dilaksanakan di akhir minggu (hari libur). Keadaan lainnya yaitu beberapa daerah di Sumatera Barat masih menggunakan tenaga hewan seperti kera untuk memetik kelapa dan populasi kucing dan anjing liar juga masih tinggi. Hewan-hewan tersebut merupakan penyumbang penularan kasus rabies terbanyak atau dikenal dengan Hewan Penular Rabies (HPR).

Pada tahun 2022 terdapat sebanyak 601 kasus PMK pada hewan ternak di Sumatera Barat yang mengalami penambahan rata-rata per harinya adalah 80 ekor (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, 2022). PMK merupakan penyakit menular yang menyerang hewan ternak, seperti sapi, kerbau, domba, kambing, dan rusa. Terdapatnya kasus PMK ini menimbulkan kekhawatiran bagi peternak dan kerugian yang sangat tinggi dari segi ekonomi berupa penurunan produksi susu, penurunan tingkat pertumbuhan sapi potong, dan penurunan ketersediaan stok daging lokal akibat tingginya potensi kematian hewan ternak.

Selain itu, dokter hewan juga berperan dalam mencegah penyebaran penyakit terutama penyakit zoonosis yang memiliki dampak terhadap kesehatan manusia. Penanganan penyakit zoonosis dengan konsep *One Health* bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyakit zoonosis dan penyakit lainnya. Menurut *Office International des Epizooties* (OIE) ilmu kedokteran hewan berfungsi menangani urusan kesehatan dan kesejahteraan hewan serta penyakit-penyakit hewan yang berkaitan dengan jaminan keamanan pangan.

Sumatera Barat terkenal sebagai destinasi wisata “kuliner halal” dan memiliki usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sektor kuliner yang rata-rata menjual produk berbahan baku daging seperti Rendang. Rendang merupakan salah satu Kuliner yang dinobatkan sebagai “*The Most Tastiest Food in the World*” oleh CNNGo. Selain itu, jaminan “makanan halal” juga menjadi faktor Sumatera Barat memenangkan “*World Best Halal Culinary Destination*”. Keadaan inilah yang membutuhkan peran dokter hewan untuk memastikan keamanan pangan (*food safety*) asal hewan agar menjamin kesejahteraan masyarakat lokal dan wisatawan. Dokter hewan juga memiliki peran untuk mendukung program keamanan pangan nasional melalui penanganan penyakit yang berkaitan dengan penyediaan produk pangan asal hewan yang sehat (*food healthy*). Agar mencapai keamanan pangan (*food safety*) asal hewan yang layak dan kecukupan daging lokal di Sumatera Barat diperlukan penjaminan sistem pangan sehat (*food safety*) sesuai dengan kriteria *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) dan Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga kesehatan hewan yang akan memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan ternak agar bahan pangan asal hewan terjaga keamanannya.

Potensi peminat jurusan kedokteran hewan di Sumatera Barat sangat tinggi sedangkan keberadaan universitas yang memiliki program studi Kedokteran Hewan di Sumatera Barat masih belum ada. Saat ini baru terdapat dua program studi Kedokteran Hewan di Pulau Sumatra

yaitu di Universitas Syiah Kuala yang sudah berdiri sejak tahun 1961 dan di Universitas Riau yang baru menerima mahasiswa pada tahun 2023. Jumlah peminatan jurusan kedokteran hewan di Universitas Syiah Kuala dari tahun 2020-2022 mengalami kenaikan sebagaimana Universitas lainnya di Indonesia. Hal ini terlihat dari data peminat jurusan Kedokteran Hewan di PTN Indonesia tahun 2020-2022 melalui jalur SNBT dan SNBP yang sangat tinggi sedangkan daya tampung (orang) masih sangat sedikit dengan rata-rata 10,9 % (Sumber: Daftar peminat PTN). Kondisi ini menunjukkan minat masyarakat yang tinggi untuk masuk kedokteran hewan khususnya di Pulau Sumatera. Data sebaran peminat program studi Kedokteran Hewan di perguruan tinggi negeri di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Penerimaan Mahasiswa SNBT dan SNBP Kedokteran Hewan tahun 2020-2022

No	Nama Perguruan Tinggi	Tahun Penerimaan Mahasiswa SNBT dan SNBP								
		2020			2021			2022		
		Peminat	Daya Tampung (orang)	Data Tampung (%)	Peminat	Daya Tampung (orang)	Data Tampung (%)	Peminat	Daya Tampung (orang)	Data Tampung (%)
1.	Universitas Syiah Kuala	868	164	18,9	1019	158	15,5	1078	154	14,3
2.	Institut Pertanian Bogor	1359	124	9,1	1324	124	9,4	1750	124	7,1
3.	Universitas Padjadjaran	506	30	5,9	605	31	5,1	844	40	4,7
4.	Universitas Gadjah Mada	1297	120	9,3	1156	120	10,4	1445	120	8,3
5.	Universitas Brawijaya	1012	151	14,9	1215	152	12,5	1457	120	8,2
6.	Universitas Airlangga	1040	135	13,0	1022	100	9,8	1318	100	7,6
7.	Universitas Udayana	543	110	20,3	718	107	14,9	1184	105	8,9
8.	Universitas Hasanuddin	540	53	9,8	770	70	9,1	830	70	8,4
9.	Universitas Nusa Cendana	263	44	16,7	393	43	10,9	488	44	9,0

Sumber: Kemdikbud.go.id

Pemilihan Kota Bukittinggi sebagai lokasi pendirian prodi kedokteran hewan UNP didasarkan pada keberadaan Fakultas Kedokteran UNP sebagai fakultas yang membawahi prodi kedokteran hewan berada di Bukittinggi. Selain itu Bukittinggi memiliki potensi lahan praktek dan jumlah pasien yang banyak, seperti Klinik Hewan, Balai Veteriner Bukittinggi, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mengatas, Kebun Binatang Kinantan Bukittinggi, dan Puskesmas Tanah Datar yang menjadi fasilitas pendukung pendidikan bagi Prodi Kedokteran Hewan UNP, sehingga memudahkan mahasiswa dalam mendapatkan pengalaman praktik.

Berdasarkan analisis situasi di atas, masih terdapat kekurangan jumlah dan distribusi tenaga dokter hewan yang belum merata sehingga berdampak pada kondisi kesehatan hewan yang menimbulkan permasalahan terhadap kesejahteraan masyarakat dan sektor ekonomi pangan, serta tingginya peminatan jurusan kedokteran hewan di PTN atau PTS Indonesia. Oleh karena itu, UNP mendirikan prodi kedokteran hewan yang bertujuan menghasilkan dokter hewan yang kompeten, bermartabat, dan bereputasi yang unggul dalam manajemen risiko kesehatan hewan dan masyarakat melalui konsep *one health* dan motto dokter hewan "*manusya mriga satwa sewaka*" yaitu mengabdikan untuk kesejahteraan manusia melalui dunia hewan. Dokter hewan lulusan Prodi Kedokteran Hewan UNP akan menjadi *leader* dalam pencegahan dan penanggulangan masalah penyakit zoonosis yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan keamanan pangan.

1.4. ANALISIS SWOT

a) Analisis SWOT Program Studi Kedokteran

Strength	Weakness
<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Negeri Padang sebagai salah satu PTN-BH di Indonesia dengan akreditasi unggul • UNP sebagai PTN-BH memiliki sumber keuangan yang sangat memadai untuk penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Kedokteran • UNP yang memiliki digital learning • Animo peminat kedokteran yang tinggi • Pembina dari FK Universitas Andalas • Lokasi kampus berada di pusat kota Bukittinggi yang merupakan kota pendidikan dan kota wisata • Merupakan satu satunya fakultas kedokteran yang berada di kota Bukittinggi • UNP memiliki sarana prasarana milik sendiri yang lengkap untuk berdirinya fakultas kedokteran • Dukungan penuh dari pimpinan universitas dan civitas akademik dalam pendirian fakultas kedokteran UNP • UNP memiliki RSUD Achmad Mochtar sebagai rumah sakit pendidikan utama yang berada di kota Bukittinggi • UNP memiliki tenaga dosen dan tenaga kependidikan yang memadai untuk penyelenggaraan fakultas kedokteran 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum manajemen kesehatan bencana yang perlu dipersiapkan dengan matang • Bangunan fakultas yang belum sempurna (masih perombakan bangunan Mess UNP lama)
Opportunity	Threat
<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya angka kejadian bencana alam di Sumatera Barat • lokasi geografis Sumatera Barat yang rawan bencana alam • belum adanya fakultas kedokteran dengan kekhususan bencana alam di Sumatera Barat. • lokasi di kampus bukittinggi, yang cukup jauh dari kampus pusat UNP yang ada di Padang • Rasio kebutuhan tenaga dokter di Sumatera Barat yang masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah ada dua fakultas kedokteran di Sumatera Barat

Gambar 8. Analisis SWOT Prodi Kedokteran

b) Analisis SWOT Program Studi Kedokteran Hewan

Strength	Weakness
<ul style="list-style-type: none"> • Universitas Negeri Padang memiliki akreditasi unggul. • Dukungan pimpinan Universitas dan stakeholder terkait dalam pembentukan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter. • Memiliki Sumber Daya Manusia (Dosen) yang mempunyai keahlian di bidang zoonosis dan keamanan pangan. • Memiliki sarana dan prasarana yang mendukung perkuliahan dan praktikum. • Terdapat wahana pendukung pendidikan di Sumatera Barat seperti Rumah Sakit Hewan Provinsi Sumatera Barat, Puskesmas, Kebun Binatang, dan Rumah Potong Halal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum mempunyai rumah sakit hewan sendiri. • Masih ada dokter hewan berstatus S1 profesi.
Opportunity	Threat
<ul style="list-style-type: none"> • Program Studi Kedokteran Hewan FK UNP dibina oleh Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis (SKHB) IPB University yang terakreditasi Unggul dan merupakan fakultas kedokteran hewan pertama dan tertua di Indonesia. • Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi etalase penyebaran penyakit hewan menular strategis (PHMS). • Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah dari 24 provinsi di Indonesia yang endemis rabies dan masih sulit untuk menjadi wilayah bebas dari kasus rabies. • Memiliki prasarana yang memadai untuk pendirian dan pengembangan rumah sakit hewan universitas dan fasilitas penunjang perkuliahan lainnya. • Bukittinggi merupakan kota pendidikan dan pariwisata strategis yang memiliki akses ke banyak daerah di sekitar dan provinsi tetangga. • Provinsi Sumatera Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara (bagian utara), Provinsi Bengkulu (bagian selatan), Provinsi Riau dan Jambi (bagian timur), dan Samudera Hindia (bagian barat). • Sumatera Barat terkenal sebagai destinasi wisata “kuliner halal” dan memiliki usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sektor kuliner yang rata-rata menjual produk berbahan baku daging. • Bukittinggi memiliki iklim yang sejuk sangat nyaman untuk dijadikan tempat pendidikan. • Indonesia secara umum dan Provinsi Sumatera Barat secara khusus masih kekurangan dokter hewan, sehingga berpeluang mengisi lapangan kerja sebagai praktisi maupun kebutuhan untuk pengujian pangan asal hewan. • Sebagai lembaga pengujian kehalalan bahan pangan asal hewan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah terdapatnya dua program studi kedokteran hewan di pulau Sumatera. • Kebijakan dan regulasi pemerintah dalam bentuk Undang-undang yang masih belum sepenuhnya mendukung profesi dokter hewan. • Masuknya dokter hewan dari luar negeri karena kebijakan global.

Gambar 9. Analisis SWOT Prodi Kedokteran Hewan

1.5. KEKHUSUSAN

a) Kekhususan Program Studi Kedokteran

Manajemen risiko kesehatan bencana alam mengacu kepada Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Permendikbud No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dokter lulusan program studi kedokteran UNP harus menguasai kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam tersebut sebagai keunggulan lulusan selain menjadi dokter yang kompeten. Pemenuhan kompetensi tersebut dilaksanakan dalam pendidikan kedokteran yang terstruktur dalam tahap akademik dan profesi.

Lulusan Program Studi Kedokteran UNP pada tahap sarjana memperoleh gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked.) dan pada tahap profesi memperoleh gelar dokter (dr.) yang unggul di bidang kedokteran sekaligus memiliki kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam. Dokter lulusan Program Studi Kedokteran UNP diharapkan mampu melakukan penilaian potensi bencana, analisis masalah kesehatan, perencanaan, evaluasi, dan pencegahan perburukan masalah kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh bencana alam.

Lulusan Program Studi Kedokteran UNP dapat menjadi dokter di layanan primer, bekerja di rumah sakit, tenaga dosen, peneliti, dan terlibat dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.

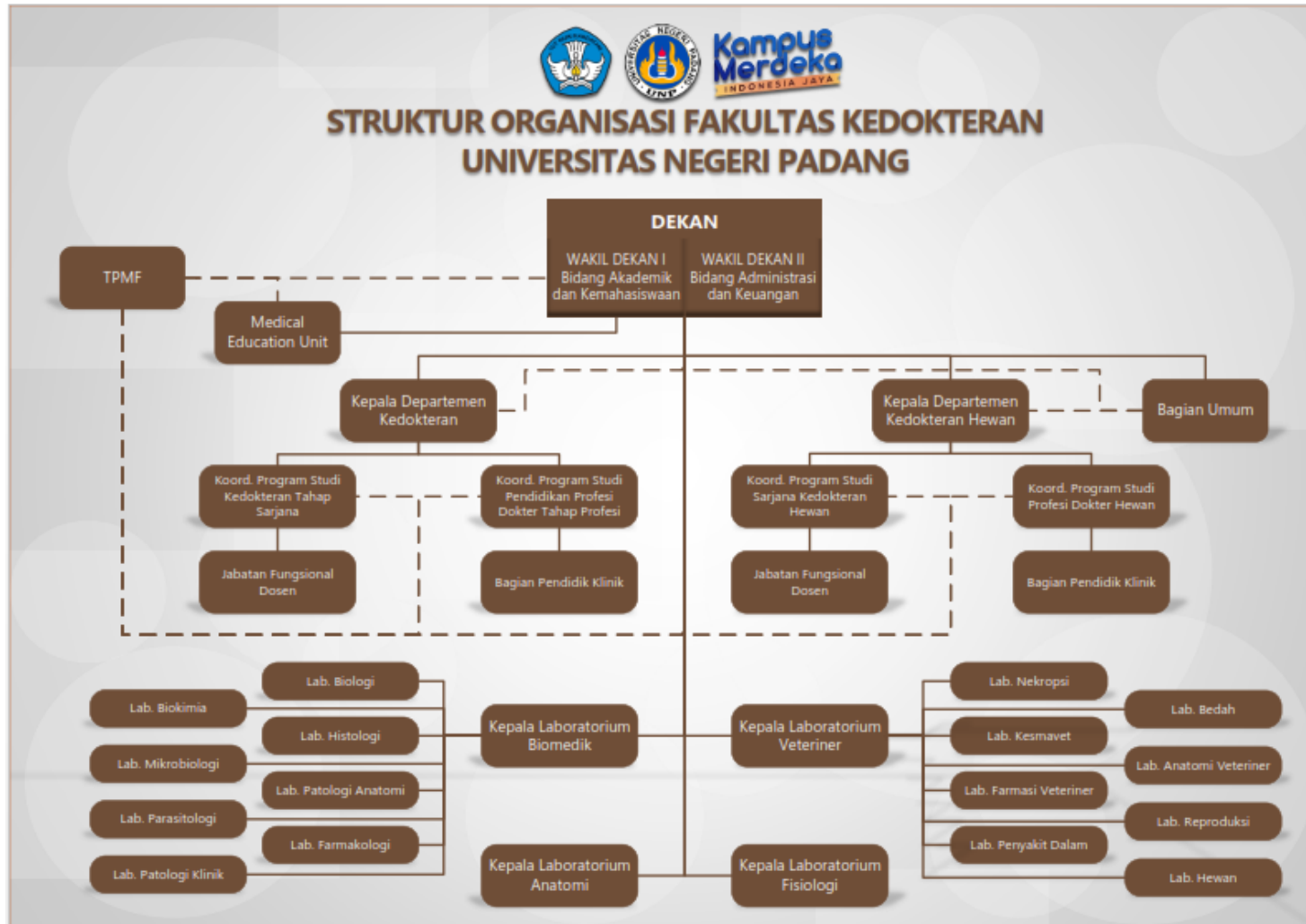
b) Kekhususan Program Studi Kedokteran Hewan

Lulusan Program Studi Kedokteran Hewan UNP pada tahap sarjana memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Hewan (S.KH.) dan pada tahap profesi memperoleh gelar dokter hewan (drh.) yang unggul di bidang kedokteran hewan sekaligus memiliki kemampuan dalam bidang keamanan pangan dan zoonosis, menjadikan dokter hewan lulusan Program Studi Kedokteran Hewan UNP dapat menjadi leader dalam keamanan pangan dan pengendalian zoonosis.

Lulusan dokter hewan dari Program Studi Kedokteran Hewan UNP dapat menjadi dokter hewan yang memiliki kemampuan menjadi seorang “five star veterinarian” dengan landasan filosofi Kedokteran Hewan yaitu “manusya mriga satwa sewaka” (mensejahterakan manusia melalui kesehatan hewan), terutama dalam bidang pengawasan keamanan pangan dan pengendalian zoonosis. Dokter hewan lulusan Program Studi Kedokteran Hewan UNP mampu melakukan pencegahan dan penanganan penyakit hewan zoonotik atau penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya, serta pengawasan keamanan pangan dengan penekanan penjaminan kualitas produk asal hewan (food safety). Lulusan dokter hewan dari Program Studi Kedokteran Hewan UNP mempunyai prospek pekerjaan di bidang veteriner maupun non-veteriner, baik di jajaran pemerintah (Perguruan Tinggi, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Karantina Hewan, Kepolisian), atau sektor swasta sebagai manajer, peneliti, akademisi, advokator, dan mampu bekerja secara mandiri sebagai praktisi klinik, wirausahawan, serta terlibat dalam bidang keamanan pangan dan pengendalian zoonosis.

1.6. UNIT PENDUKUNG

Terdapat beberapa unit pendukung di Fakultas kedokteran UNP, yaitu:



Gambar 10. Struktur Organisasi Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang

Pada Gambar 10 dijelaskan tata kelola dan hubungan kerja yang dijalankan dalam mengelola program studi kedokteran hewan. Dekan sebagai pimpinan tertinggi di fakultas memberikan arahan dan mendisposisikan kegiatan kepada Wakil Dekan sesuai dengan bidang masing-masing, urusan ketatausahaan diteruskan ke Bagian Umum, pengembangan dan perencanaan kurikulum kepada Medical Education Unit (MEU). Wakil Dekan dan Bagian Umum akan menindaklanjuti surat tersebut, jika diperlukan akan diteruskan kepada Kepala Departemen, kemudian Kepala Departemen akan melaksanakan kegiatan tersebut dan meneruskannya kepada Koordinator Program Studi terkait. Selanjutnya terdapat Jabatan Fungsional Dosen dan Bagian Pendidik Klinik. Ketua Laboratorium bertanggung jawab langsung kepada Dekan ataupun Wakil Dekan. Dekan, Wakil Dekan, MEU, Bagian Umum, Kepala Departemen dan Koordinator Program Studi berkoordinasi dengan Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) melalui monitoring yang dilaksanakan

Dalam menjalankan fungsi organisasi unit pengelola program studi yang efektif, maka diterapkan lima aspek unsur pengelolaan program studi mencakup yaitu:

1) Unsur penyusun kebijakan

Unsur penyusun kebijakan terdiri dari Senat Akademik Fakultas dan Dekan. Keanggotaan Senat Akademik Fakultas terdiri dari Dekan, Wakil Dekan, Kepala Departemen merupakan anggota *ex officio* Senat Akademik Fakultas, ditambah 3 (tiga) orang wakil dosen dari masing-masing departemen. Kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan di tingkat fakultas dimintakan pertimbangan ke Senat Akademik Fakultas sebagaimana tugasnya berperan dalam memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan dan pengawasan, pelaksanaan kebijakan akademik di fakultas. Kebijakan tersebut antara lain kenaikan pangkat dosen, pembukaan departemen dan atau program studi baru, renstra fakultas, kurikulum program studi, peraturan akademik.

2) Unsur pelaksana akademik

Unsur pelaksana akademik terdiri dari dekan dibantu oleh wakil dekan bidang akademik, kepala dan sekretaris departemen, koordinator program studi.

3) Unsur pengawas dan penjaminan mutu

Unsur pengawas dan penjaminan mutu ditingkat Universitas dilaksanakan oleh Badan Penjamin Mutu Internal (BPMI) yang mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2022. Di tingkat fakultas, kegiatan pengawasan dan penjaminan mutu dilaksanakan oleh tim pengendalian pelaksanaan standar UNP (Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2022). Selain itu, Senat Akademik Fakultas ikut dalam mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas.

4) Unsur penunjang akademik atau sumber belajar

Unit pengelola program studi memiliki unsur penunjang akademik seperti pelayanan akademik dengan sistem IT online (*e-Office UNP*). Pada sistem ini dosen dan mahasiswa bisa memakai *e-Learning*. Kedua layanan tersebut sama-sama menunjang proses akademik yang

memang menjadi *core business* di perguruan tinggi. Pengurusan administrasi surat- surat akademik secara *online* melalui <https://portal.unp.ac.id>. Portal UNP menyediakan layanan pengurusan surat aktif kuliah, permohonan ujian tugas akhir, permohonan PLK/PL. Selain pelayanan *online*, fakultas memiliki perpustakaan dan masing-masing departemen/program studi menyediakan sumber belajar seperti ruang baca, ruang komputer, laboratorium dan setiap ruangan sudah dilengkapi akses *WiFi*.

5) Unsur pelaksana administrasi atau tata usaha

Unsur pelaksana administrasi atau tata usaha adalah unsur pelayanan teknis administratif yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan. Unsur pelaksana administrasi atau tata usaha dipimpin oleh Kepala Sub-bagian berasal dari tenaga kependidikan yang di angkat oleh Rektor. Kepala Sub-bagian mempunyai tugas melaksanakan layanan teknis dan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, dan alumni serta urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik negara, pelaporan, dan penyiapan bahan kerja sama, dan hubungan masyarakat di lingkungan fakultas. Unsur pelaksana administrasi atau tata usaha tercantum dalam Peraturan Rektor Nomor 02 Tahun 2022 tentang Fakultas pada Universitas Negeri Padang.

Departemen Kedokteran memiliki empat program studi yaitu Program Studi Kedokteran, Program Studi Profesi Dokter, Program Studi Kedokteran Hewan dan Program Studi Profesi Dokter Hewan. *Medical Education Unit* (MEU) merupakan unit di bawah Wakil Dekan I yang mengelola perencanaan, pembuatan dan evaluasi kurikulum Program Studi Kedokteran. Secara rinci tugas pokok MEU sebagai berikut:

- a) Mengembangkan kurikulum, mulai dari perencanaan kurikulum, sistem penilaian (*assesment*), metode pembelajaran dan pengajaran dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kurikulum.
- b) Melakukan pelatihan dan pengembangan tenaga pendidik/dosen terkait pengembangan kurikulum, perencanaan evaluasi metode pembelajaran dan pengajaran.

Medical Education Unit (MEU) direncanakan terdiri dari lima sub-unit yaitu sub-unit kurikulum, sub- unit asesmen, sub-unit skenario, sub-unit pengembangan SDM dan sub-unit monitoring dan evaluasi.

1.7. SINERGISME INTERNAL DAN EKSTERNAL

a) Program Studi Kedokteran

Program Studi Kedokteran UNP bekerja sama dengan rumah sakit dan puskesmas yang bertindak sebagai wahana Pendidikan. Berikut daftar rumah sakit yang bekerjasama dengan Program Studi Kedokteran UNP yang akan dijadikan sebagai rumah sakit untuk pendidikan pada tahap profesi.

Tabel 3. Wahana Pendidikan Program Studi Kedokteran

No	Nama Rumah Sakit	Tipe RS	Status Akreditasi	Kepemilikan		Jarak Lokasi
				SD	SW	
1	Rumah Sakit Umum dr. Achmad Mochtar Bukittinggi (Rumah Sakit Pendidikan Utama)	B	Tingkat Paripurna	√		3 km
2	Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman (Rumah Sakit Satelit)	B	Tingkat Paripurna	√		65,6 km
3	Rumah Sakit Umum Padang Panjang (Rumah Sakit Satelit)	C	Tingkat Paripurna	√		21,4 km
4	Rumah Sakit Jiwa HB Sa'anin (rumah sakit afiliasi)	A	Tingkat Paripurna	√		98,5 km

Program Studi Kedokteran UNP memiliki wahana pendidikan puskesmas di Kota Bukittinggi melalui kerjasama dengan Wali Kota Bukittinggi (Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi) dan puskesmas di kota Padang melalui Kerjasama dengan Wali Kota Padang (Dinas Kesehatan Kota Padang). Puskesmas di Kota Bukittinggi yaitu Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad dan Puskesmas Guguk Panjang. Puskesmas di Kota Padang yaitu Puskesmas Air Dingin dan Puskesmas Anak Air. Selain Puskesmas, wahana pendidikan lain untuk pencapaian kompetensi peserta didik di Program Studi Kedokteran UNP yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan di tingkat Kota/Kabupaten, dan LSM.

b) Program Studi Kedokteran Hewan

Program Studi Kedokteran Hewan UNP bekerja sama dengan rumah sakit hewan dan klinik hewan yang bertindak sebagai wahana Pendidikan. Berikut daftar wahana pendidikan yang bekerjasama dengan Program Studi Kedokteran Hewan UNP yang akan dijadikan sebagai sarana untuk pendidikan pada tahap profesi.

Tabel 4. Data Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan

No	Nama Rumah Sakit	Kepemilikan		Jarak Lokasi
		SD	KS	
1.	UPTD Rumah Sakit Hewan Sumatera Barat Gandaria 55, Jati Baru, Kec. Padang Tim., Kota Padang, Sumatera Barat 25129		√	87,0 km
2.	Klinik Hewan Paw's Vet Jl. Aur Duri, Gurun Laweh Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat 25143		√	94,2 km
3	Klinik Hewan Univet Jl. Raya Batusangkar No.400, Ampang Gadang, Kec. Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat 26132		√	5,8 km

Tabel 5. Wahana Praktik Kedokteran Hewan

No	Nama/Jenis Wahana Praktik	Jumlah Unit	Kepemilikan	Jarak Lokasi
1.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat Jl. Rasuna Said No.68, Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatra Barat	1	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	87,0 km
2.	BPTU-HPT Padang Mengatas Jl. Padang Mengatas, Mungo, Kec. Luak, Kab. Lima Puluh Kota	1	Dirjen Peternakan dan Keswan Kementerian Pertanian	45,0 km
3.	Balai Veteriner Bukittinggi (Kementerian Pertanian) Jl. Raya Bukittinggi-Payakumbuh, Tabek Panjang, Kec. Baso, Kab. Agam	1	Dirjen Peternakan dan Keswan Kementerian Pertanian	15,0 km
4.	Puskesmas Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung Jl. H Jl. H. Agus Salim No.1, Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat	1	Kementerian Pertanian	101 km

No	Nama/Jenis Wahana Praktik	Jumlah Unit	Kepemilikan	Jarak Lokasi
	27562			
5.	Peternakan Sapi Perah (Moosa Edufarm) Jalan Batang Barus, Kec. Gunung Talang, Kab. Solok	1	Swasta	100,0 km
6.	Peternakan Unggas (Farm Gunung Nago Group) Limau Manis Selatan, Kota Padang	1	Swasta	99,0 km

BAB 2

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1 VISI

Visi Fakultas Kedokteran :

Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang bermartabat dan unggul di tingkat nasional dan internasional

Visi Program Studi Kedokteran:

Menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional

Visi Program Studi Kedokteran:

Menghasilkan dokter hewan yang bermartabat dan unggul dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit zoonosis dan keamanan pangan di tingkat nasional dan internasional

2.2. MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter yang bermartabat dan unggul dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait manajemen risiko kesehatan bencana alam.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutamadalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan,penanggulangan, dan rehabilitasi masalah kesehatan terkait bencana alam.
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama manajemen risiko kesehatan bencana alam.

2.3. MISI PROGRAM STUDI KEDOKTERAN HEWAN

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan dokter hewan yang bermartabat dan unggul dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit zoonosis dan keamanan pangan di tingkat nasional dan internasional
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi dan publikasi kesehatan global terutama terkait pencegahan dan penanggulangan zoonosis dan keamanan pangan
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan menjadi ujung tombak dalam penanggulangan masalah kesehatan terutama di bidang pencegahan dan penanggulangan zoonosis dan keamanan pangan

4. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan zoonosis dan keamanan pangan
5. Melaksanakan kerjasama lokal, nasional dan internasional di bidang kesehatan terutama dalam pencegahan dan penanggulangan zoonosis dan keamanan pangan

2.4. TATA NILAI

a. *Integritas.*

Pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sesuai dengan nilai integritas, pegawai UNP diharapkan konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan dan mengemban kepercayaan. Adapun indikator yang mencerminkan nilai integritas adalah:

- a. Keteguhan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam tindakan;
- b. Jujur dalam segala tindakan dan perbuatan;
- c. Menghindari benturan kepentingan;
- d. Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Menghindari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. Mematuhi sumpah dan janji pegawai/jabatan;
- h. Menghindari perbuatan rekayasa atau manipulasi; dan
- i. Menolak gratifikasi dalam bentuk apapun.

b. *Kreatif dan Inovatif*

Nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Hal baru tersebut dapat berupa gagasan, metode, atau alat. Indikator dari nilai kreatif dan inovatif adalah:

- a. Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru;
- b. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan;
- c. Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide pengembangan, bersifat sesuatu yang baru dan konstruktif;
- d. Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah;
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien;
- f. Mengupayakan hasil yang optimal; dan
- g. Berani mengikuti perkembangan zaman;

c. *Inisiatif*

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Pegawai UNP sewajarnya melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang

baru atau menghindari timbulnya masalah. Indikator dari nilai inisiatif adalah:

- a. Responsif melayani kebutuhan pemangku kepentingan;
- b. Bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi;
- c. Memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah;
- d. Memiliki kepekaan dan keterbukaan untuk hal-hal baru; dan
- e. Berani untuk mengajukan pendapat yang berbeda, berlindung dari kegagalan, berargumentasi bahwa apa yang Anda lakukan telah disetujui oleh semua anggota tim.

d. *Pembelajaran*

Pada nilai pembelajar terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Pegawai UNP harus berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, serta mampu mengambil hikmah dan pelajaran atas setiap kejadian. Indikator yang menunjukkan nilai pembelajar adalah:

- a. Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman;
- b. Mengambil hikmah dari setiap kesalahan dan menjadikannya pelajaran;
- c. Berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja;
- d. Memanfaatkan waktu dengan baik;
- e. Suka mempelajari hal yang baru; dan
- f. Rajin belajar/bertanya/berdiskusi.

e. *Meritokrasi*

Nilai menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Pegawai UNP perlu memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya. Indikator yang mencerminkan nilai ini adalah:

- a. Berkompeterisi secara profesional;
- b. Kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai;
- c. Penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja;
- d. Penuh pertimbangan;
- e. Mementingkan kepentingan institusi daripada kepentingan diri sendiri;
- f. Menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya; dan
- g. Mendapatkan promosi bukan karena kedekatan/primordialisme.

f. *Tanpa Pamrih*

Nilai tanpa pamrih memiliki arti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Pegawai UNP, yang memiliki nilai tanpa pamrih, tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi. Sebaliknya pegawai UNP memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha menghasilkan karya terbaiknya sesuai dengan tujuan bersama. Indikator nilai tanpa pamrih

adalah:

- a. Penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan;
- b. Rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya;
- c. Menunjukkan perilaku 4S (senyum, sapa, sopan, dan santun);
- d. Melakukan pekerjaan secara sukarela; dan
- e. Berbaik sangka dan berpikir positif kepada rekan kerja

2.5. TUJUAN

a. Program Studi Kedokteran

- Menghasilkan lulusan dokter yang bermartabat dan unggul dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam di tingkat nasional dan internasional.
- Menghasilkan publikasi nasional dan internasional melalui penelitian yang berbasis perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan terutama dalam manajemen risiko kesehatan bencana alam.
- Memberikan pelayanan kesehatan komprehensif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus kemampuan manajemen risiko kesehatan bencana alam melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Terjalannya kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam bidang kesehatan terutama bidang manajemen risiko kesehatan bencana alam

b. Program Studi Kedokteran Hewan

- Berkontribusi dalam upaya pemenuhan dan pemerataan kebutuhan dokter hewan yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan informasi di Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Barat.
- Mendorong diversifikasi pengabdian, pendidikan, dan penelitian bidang kesehatan hewan di Universitas Negeri Padang.
- Menghasilkan lulusan dokter hewan yang bermartabat, unggul kompeten, dan bereputasi yang memiliki keunggulan dalam pencegahan dan penanggulangan masalah penyakit zoonosis yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan keamanan pangan (food safety).
- Menghasilkan lulusan dokter hewan yang memiliki keterampilan dalam mengorganisasi serta memberikan edukasi tentang kesehatan hewan, potensi penularan penyakit zoonosis, dan keamanan pangan asal hewan, baik secara langsung maupun melalui platform media sosial.

2.6. SASARAN PROGRAM STUDI

1. Peningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan yang ada di program studi kedokteran dan kedokteran hewan melalui kegiatan *faculty development* dan *continuing medical education*.
2. Meningkatkan pelayanan akademik dan non-akademik berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran.
4. Peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi (pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).
5. Menghasilkan lulusan dokter dengan keunggulan manajemen risiko kesehatan bencana alam.
6. Menghasilkan lulusan dokter hewan dengan keunggulan pencegahan zoonosis dan penjaminan terhadap keamanan pangan.
7. Terlaksananya program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
8. Terlaksananya program kegiatan sosialisasi, promosi, seleksi dan rekrutmen untuk menghasilkan calon mahasiswa yang lebih baik secara kualitas dan kuantitas.

2.7. STRATEGI PROGRAM STUDI

1. Melakukan peningkatan kapasitas dan update keilmuan berkala dan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil *assessment*.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk pelaksanaan aktivitas berbasis teknologi informasi.
3. Melaksanakan rapat kerja program studi dalam rangka mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan serta anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkala, sistematis dan konsisten.
5. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* terkait kebencanaan (BPBD Kota/Kabupaten, *Non Government Organization*).
6. Menyelenggarakan program kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan instansi baik di dalam maupun di luar negeri.
7. Menyelenggarakan program kegiatan sosialisasi, promosi, seleksi dan rekrutmen untuk menghasilkan calon mahasiswa yang lebih baik secara kualitas dan kuantitas.

2.8. KEBIJAKAN MUTU

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan secara efektif, efisien dan akuntabel, maka setiap unit di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang dalam merancang serta melaksanakan tugas, fungsi dan pelayanannya harus berdasarkan standar mutu yang semakin baik dan mengikuti manual ataupun prosedur tertentu yang ditetapkan dalam SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang dan secara periodik dilakukan evaluasi diri serta audit internal mutu.

Universitas Negeri Padang telah melaksanakan SPMI sejak tahun 2004 oleh Badan Penjaminan Mutu Internal (BPMI) yang ditetapkan dengan SK Rektor Nomor 86/J41/KP/2004. Kemudian pada tahun 2017 pelaksanaan SPMI di UNP direstrukturisasi sejalan dengan pembentukan penjaminan mutu UNP distrukturkan lagi sejalan dengan pembentukan LP3S (Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pelaksana tugas Strategis), dimana fungsi penjaminan mutu internal pada tingkat universitas dikelola oleh Pusat Penjaminan Mutu yang ditetapkan dengan SK Rektor Nomor 2139/UN35/OT/2017. Dalam SK Rektor ini juga ditetapkan bahwa pada tingkat fakultas SPMI dilaksanakan oleh Gugus Penjamin Mutu Internal (GPMI) dan di tingkat Program Studi dilaksanakan oleh Unit Penjamin Mutu Internal (UPMI). Akhirnya pada tahun 2022, sesuai dengan perubahan status pengelolaan Universitas Negeri Padang dari PTN BLU menjadi PTN BH yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021, dan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang, maka SPMI pada tingkat universitas dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang langsung berada di bawah Rektor.

Sistem penjaminan mutu di Universitas Negeri Padang dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas, jurusan/program studi, dan unit-unit kerja sesuai dengan Manual Mutu, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Manual Mutu tersebut mencakup:

1. Pernyataan Mutu
2. Kebijakan Mutu
3. Unit Pelaksana
4. Standar Mutu
5. Prosedur Mutu
6. Instruksi Kerja
7. Pentahapan Sasaran Mutu

Semuanya terintegrasi dalam suatu sistem dokumen. Dalam melaksanakan penjaminan mutu, UNP telah memiliki Rencana Penjamin Mutu yang mencakup; strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan. Dokumen standar mutu UNP (standar mutu, kebijakan mutu, manual mutu, dan formulir mutu) tahun 2019 merupakan dokumen standar mutu 2017 yang sudah direvisi dan ditetapkan dengan SK Rektor UNP Nomor 1881/UN35/KP/2019. Revisi standar mutu dilakukan berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI) terhadap ketercapaian pelaksanaan standar, tuntutan Indikator Kinerja Utama (IKU) UNP, dan tuntutan dari BAN-PT untuk mencapai perguruan tinggi dengan kategori unggul. Instrumen

Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi – APT 3.0 6 standar mutu UNP terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian, dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, sehingga prosedur pelaksanaan masing-masing standar tersebut terdiri dari 24 prosedur. Setiap jenjang struktur organisasi di lingkungan UNP telah melaksanakan standar mutu sesuai dengan kompetensi masing-masing bidang.

Implementasi penjaminan mutu di Universitas Negeri Padang, dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tata kelola penjaminan mutu dengan membentuk organisasi penjaminan mutu di tingkat universitas, fakultas dan program studi.
- b. Melengkapi dokumen mutu akademik dan non-akademik di setiap unit.
- c. Melakukan re-akreditasi program studi dan institusi.
- d. Membentuk budaya mutu setiap unit di Universitas Negeri Padang dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh auditor internal.
- e. Melakukan peningkatan standar mutu Universitas Negeri Padang, berlandaskan SNPT dan mengacu kepada standar lembaga akreditasi nasional dan internasional.

Azaz Pelaksanaan Kebijakan

- a. Asas akuntabilitas, yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- b. Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- c. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
- d. Asas kebersamaan, yaitu bahwa kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- e. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- f. Asas manfaat, yaitu bahwa kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.

- g. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- h. Asas kemandirian, yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

Universitas Negeri Padang telah melaksanakan siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk memastikan tercapainya tujuan SPMI UNP, dilakukan monitoring/audit secara berkala dan dilanjutkan evaluasi serta pengembangan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan. Penggunaan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi) menuntut semua unit yang ada di UNP membuat evaluasi diri secara berkala dalam menilai kinerja unitnya berdasarkan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh UNP. Hasil evaluasi diri dari unit dilaporkan ke pimpinan unit dan staf unit yang bersangkutan, serta pimpinan UNP. Berdasarkan hasil evaluasi diri tersebut, pimpinan unit dan pimpinan UNP akan membuat keputusan dalam mengambil tindakan yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu.

Tahapan siklus dilakukan dalam rangka menjamin mutu setiap penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNP sehingga hasil evaluasi SPMI diketahui kekuatan dan kelemahannya, yang kemudian dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan. Pelaksanaan SPMI UNP dengan menerapkan siklus PPEPP menghasilkan kesiapan semua unit mulai dari tingkat universitas, fakultas hingga program studi. Semua unit disiapkan untuk menuju budaya mutu di UNP, selain itu juga disiapkan untuk penjaminan mutu eksternal (SPME) oleh BAN PT dan LAM serta pengakuan lembaga akreditasi asing yang kredibel.

Peningkatan standar mutu mengacu pada Manual Mutu UNP. Peningkatan terhadap pelaksanaan standar dilakukan setelah tercapainya indikator kinerja dari standar yang sudah ditetapkan, tuntutan IKU, dan tuntutan dari BAN-PT untuk pencapaian kategori Unggul. Peningkatan standar mutu dilakukan melalui tahapan revisi dokumen standar mutu. Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah :

a. Quality First

Semua pikiran dan tindakan pengelola Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang harus memprioritaskan mutu

b. Stakeholders-in

Semua pikiran dan tindakan pengelola Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal)

c. The next process is our stakeholders

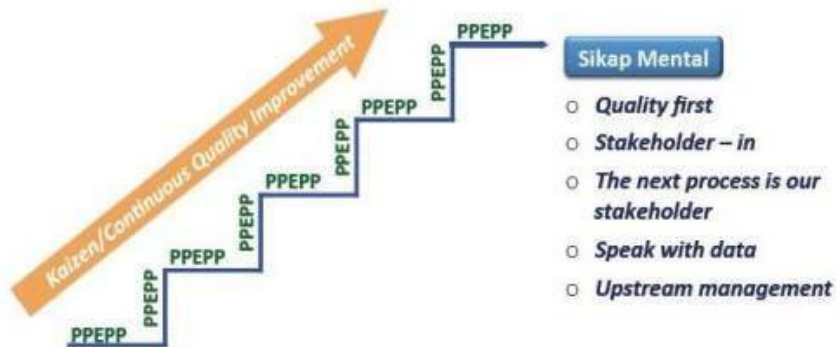
Setiap pihak yang menjalagannya dalam proses pendidikan pada Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pelaku harus melaksanakan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang telah diperolehnya terlebih dulu, bukan berdasarkan pengandaian atau rekayasa

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/ kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif



Gambar 11. Prinsip pelaksanaan siklus SPMI

Program studi Kedokteran dan Kedokteran Hewan UNP berada dibawah Fakultas Kedokteran, dan dipimpin oleh seorang Ketua Departemen Kedokteran. Departemen Kedokteran terdiri atas Tahap Akademik dan Tahap Profesi yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua. Dalam menjalankan tugas monitoring evaluasi seluruh proses pembelajaran, Ketua Departemen Kedokteran dibantu oleh MEU (*Medical Educatioun Unit*) dan GKM (Gugus Kendali Mutu). Monitoring Evaluasi proses pembelajaran sehari-hari seperti tercapai atau tidaknya CPL dan CPMK, *assesment* dilakukan oleh GKM. GKM kemudian berkoordinasi dengan BAPEM (tingkat fakultas) dan LP3S (tingkat universitas) untuk melakukan audit berkala setiap tahunnya. Hasil audit kemudian diteruskan pada ketua Departemen untuk ditindaklanjuti dan dicarikan solusinya (siklus PPEPP).

Selain GKM, di bawah MEU juga terdapat Tim Kurikulum Program Studi Kedokteran dan Kedokteran Hewan UNP. Setiap masukan dari GKM dan civitas akademika lainnya diteruskan kepada Tim Kurikulum. Tim Kurikulum selanjutnya akan menelaah dan bila perlu melakukan revisi minor kurikulum. Setiap 5 tahun dilakukan revisi mayor kurikulum untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan masyarakat, dengan mendengarkan masukan dari *stakeholder* internal dan eksternal.

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN

Dalam Rencana Strategis tahun 2022-2024 arah kebijakan dan strategi FK UNP adalah:

1. Arah kebijakan peningkatan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan yang meliputi:
 - a. Meningkatkan kualitas seleksi masuk calon mahasiswa
 - b. Meningkatkan jumlah pelatihan model pembelajaran inovatif bagi dosen
 - c. Melaksanakan Revisi kurikulum yang bermuara kepada mutu lulusan dan kebutuhan pasar kerja
 - d. Mengembangkan pembelajaran berbasis e-learning
 - e. Menyediaan perangkat pendukung pembelajaran yang berkualitas
 - f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa
 - g. Memfasilitasi kegiatan kemahasiswaan mengikuti forum ilmiah pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional
 - h. Memfasilitasi dosen mengikuti kegiatan ilmiah pada tingkat nasional dan internasional
 - i. Menyediaan sarana pendukung pembelajaran yang berkualitas seperti perpustakaan, pusat komputer, laboratorium, bengkel kerja, balai bahasa, dan ruang baca
 - j. Menyiapkan perangkat pembelajaran yang berkualitas seperti silabus, satuan acara perkuliahan (SAP), dan modul pembelajaran.
 - k. Meningkatkan kuantitas dosen sesuai dengan kebutuhan
 - l. Meningkatkan kuantitas dosen melalui pendidikan lanjut (S3) dan jabatan fungsional Guru Besar
 - m. Meningkatkan kuantitas jumlah dosen yang memiliki sertifikasi profesi keahlian
 - n. Meningkatkan keterlibatan dosen dalam pertemuan ilmiah tingkat nasional dan internasional
 - o. Meningkatkan layanan perpustakaan dan laboratorium
 - p. Meningkatkan harmonisasi dan lingkungan sekitar kampus
 - q. Meningkatkan daya saing dan daya tampung
 - r. Mengoptimalkan kapasitas dan program kegiatan lembaga kemahasiswaan
 - s. Meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan
2. Arah kebijakan peningkatan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan adalah:
 - a. Meningkatkan publikasi internasional
 - b. Meningkatkan jumlah jurnal bereputasi terindeks global
 - c. Meningkatkan jumlah jurnal bereputasi terindeks nasional
3. Arah kebijakan penguatan kapasitas inovasi adalah sebagai berikut:
 - a. Pembentukan Pusat Unggulan Iptek (PUI)
 - b. Peningkatan Jumlah produk inovasi
 - c. Peningkatan Jumlah penguatan kualitas inovasi (Komersialisasi)

3.2. STRATEGI

Untuk mencapai sasaran di atas, dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pembelajaran berbasis standar internasional dan daring
2. Meningkatkan kualitas lulusan yang inovatif dan mampu bersaing secara di Asia
3. Meningkatkan budaya penelitian dan publikasi internasional bereputasi global pada dosen UNP
4. Meningkatkan penelitian inovasi dosen sehingga berkontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah dan bangsa
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga terbangun rekognisi dosen dan universitas secara global
6. Meningkatkan peran UNP dalam pembangunan bangsa Indonesia
7. Meningkatkan manajemen universitas sehingga transparan, adil dan mandiri
8. Mewujudkan Universitas Negeri Padang sebagai PTN-BH
9. Meningkatkan implementasi kerjasama nasional dan internasional sehingga berdampak positif bagi perkembangan UNP.

3.3. KERANGKA REGULASI

Sumber referensi untuk menyusun rencana strategis FK UNP tahun 2022-2024 adalah:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
14. Keputusan Presiden Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bagi Perguruan Tinggi Negeri Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
22. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 335/KMK.05/2015 tentang Penetapan Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
23. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 164/E/KPT/2022 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Teknologi Tahun 2020-2024
24. Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Implementasi renstra FK UNP sangat ditentukan oleh kerangka kelembagaan yang ditetapkan. Undang- Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan fungsi Pendidikan Tinggi adalah:

1. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

BAB 4

TARGET KINERJA DAN INDIKATOR

4.1. TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, UNP menetapkan sasaran program. Setiap sasaran program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT). Disamping itu, FK UNP juga berupaya untuk meningkatkan capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan oleh Kemdikbud Ristek melalui perjanjian kinerja antara Rektor dengan Ditjen Dikti Ristek. Indikator Kinerja Utama tersebut dituangkan dalam keputusan Mendikbud RI Nomor 3/M/2021 tentang IKU PTN dan L2DIKTI di Kemdikbud.

Rencana Strategis juga merupakan upaya untuk mempertahankan kualitas dan pelayanan penyelenggaraan pendidikan tinggi FK UNP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Semuanya bertujuan untuk menjamin agar Pembelajaran pada Program Studi, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan FK UNP mencapai dan bahkan melampaui standar mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. Karena itu, dalam penetapan indikator kinerja, FK UNP juga menetapkan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) di samping Indikator Kinerja Kegiatan yang merupakan turunan langsung dari Indikator Kinerja Utama. Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan Permendikbud No. 3 tahun 2020 terdiri atas:

- a. standar kompetensi lulusan;
- b. standar isi Pembelajaran;
- c. standar proses Pembelajaran;
- d. standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
- e. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- f. standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
- g. standar pengelolaan; dan
- h. standar pembiayaan Pembelajaran

Dalam proses penjaminan mutu, standar tersebut diwujudkan dalam 9 kriteria akreditasi yang merupakan rujukan dalam penyusunan Renstra ini, yaitu: 1) Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi, 2) Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama, 3) Mahasiswa, 4) Sumber Daya Manusia, 5) Keuangan, Sarana, dan Prasarana, 6) Pendidikan, 7) Penelitian, 8) Pengabdian kepada Masyarakat, dan 9) Luaran dan Capaian Tridharma. Secara lebih rinci target Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dicapai dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Indikator Kinerja Tambahan

Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama		Indikator Kinerja Kegiatan/Tambahan			Satuan	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi	IKU-1	Persentase lulusan dokter yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi	IKK	1	Persentase lulusan yang langsung bekerja dalam jangka waktu < 6 bulan setelah kelulusan	Persentase	0	0
				2	Persentase Lulusan yang Melanjutkan Studi dalam jangka waktu < 12 bulan	Persentase	0	0
			IKT	1	Rata-rata Lama Studi Mahasiswawa (S1)	Tahun	0	0
				2	Persentase kelulusan tepat waktu	Persentase	0	0
				3	Persentase Lulusan dengan masa tunggu < 6 bulan	Persentase	0	0
				4	Persentase lulusan yang bekerja sesuai dengan bidangnya	Persentase	0	0
				5	Kepuasan Pengguna Lulusan	Persentase	0	0
				6	Skor TOEFL Lulusan S1 \geq 450	Persentase	0	0
	7	Tempat Kerja Lulusan Berskala Internasional	Persentase	0	0			
	8	Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi dan/atau Profesi	Persentase	0	0			
	IKU-2	Persentase lulusan S1 yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi minimal tingkat nasional	IKK	1	Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa	Persentase	0	0
				2	Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang bersertifikat	Persentase	0	0
				3	Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan proyek kemanusiaan	Persentase	0	0
				4	Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan proyek di desa	Persentase	0	0
5				Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan bela negara	Persentase	0	0	
6				Persentase mahasiswa yang berprestasi di tingkat nasional	Persentase	0	5	
7				Jumlah mahasiswa yang berprestasi di tingkat internasional	Jumlah	0	1	
8				Rasio jumlah dosen dan mahasiswa	Rasio	1 : 3	1 : 5	
IKT			1	Persentase Lulusan Memperoleh Indeks Prestasi Mahasiswawa (IPK) \geq 3,25	Persentase	0	0	
			2	Rata-rata IPK Lulusan	Rata-rata	0	0	
Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi	IKU-3	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS100 (berdasarkan ilmu) atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	IKK	1	Jumlah dosen berkegiatan tridharma di PT lain	Persentase	0	2
				2	Jumlah dosen berkegiatan tridharma di PT QS 100	Persentase	0	1
				3	Jumlah dosen yang membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional	Persentase	0	1
				4	Persentase dosen yang mengikuti kegiatan asosiasi profesi	Persentase	50	70
	IKU-4	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional dan dunia kerja	IKK	1	Persentase dosen berkualifikasi Doktor	Persentase	10	15
				2	Persentase dosen berkualifikasi S2 yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui internasional	Persentase	0	3
				3	Persentase dosen berkualifikasi S2 yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi yang diakui BNSP	Persentase	100	100
				4	Jumlah dosen praktisi	Persentase	0	5

			IKT	1	Persentase mata kuliah yang diajar oleh dosen praktisi	Persentase	0	2	
				2	Persentase dosen berjabatan akademik guru besar	Persentase	0	0	
				3	Persentase dosen berjabatan Akademik Lektor Kepala	Persentase	0	3	
	IKU-5	Jumlah keluaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.		IKK	1	Jumlah publikasi internasional	Jumlah	0	0
					2	Jumlah jurnal bereputasi terindeks nasional	Jumlah	0	0
					3	Jumlah jurnal bereputasi terindeks global	Jumlah	0	0
					4	Jumlah sitasi karya ilmiah	Jumlah	0	0
					5	Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan	Jumlah	0	0
					6	Jumlah publikasi terindeks scopus terbit per tahun	Jumlah	0	0
					7	Jumlah publikasi terindeks <i>Web of Science</i> terbit per tahun	Jumlah	0	0
					8	Persentase dosen yang menjadi anggota asosiasi internasional	Persentase	0	0
					9	Jumlah buku yang diterbitkan/Ber-ISBN/Book Chapter	Jumlah	0	0
					10	Jumlah karya rujukan yang dihasilkan dosen (Handbook, Panduan-panduan, manual, textbook, monograph)	Jumlah	0	0
				IKT	1	Jumlah Judul Penelitian Dosen	Jumlah	0	0
2					Jumlah Judul PKM Dosen	Jumlah	0	0	
3					Rekognisi Dosen	Jumlah	0	0	
4					Jumlah Sitasi Karya Ilmiah (1-10)	Jumlah	0	0	
Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran	IKU-6	Persentase mata kuliah S1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	IKK	1	Mata kuliah menggunakan pemecahan kasus (case method)	Persentase	0	0	
				2	Mata kuliah menggunakan pembelajaran proyek berbasis kelompok (team-based project)	Persentase	0	0	
	IKU-7	Persentase prodi S1 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional diakui pemerintah		IKK	1	Persentase prodi Ter-Akreditasi A/Unggul	Persentase	0	0
					2	Prodi terakreditasi internasional	Persentase	0	0
					3	Global ranking berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (<i>Webometric</i>)	Peringkat	0	0
					4	Peringkat di QS WUR (<i>World University Ranking</i>)	Peringkat	0	0
					5	Peringkat di QS WUR (<i>World University Ranking</i>) by Subject	Peringkat	0	0
					6	Peringkat di QS AUR (<i>Asian University Ranking</i>)	Peringkat	0	0

				7	Rasio Afirmasi	Persentase	0	0
				8	Peringkat Kampus berkelanjutan (<i>Green Matric</i>)	Peringkat	0	0
				9	Jumlah dosen asing	Jumlah	0	0
				10	Jumlah mahasiswa asing	Jumlah	0	0
				11	Jumlah kelas internasional	Jumlah	0	0
				12	Jumlah <i>International Exchange Students (Inbound)</i>	Jumlah	0	0
				13	Jumlah <i>International Exchange Students (Outbond)</i>	Jumlah	0	0
				14	Rangking PT tingkat Nasional (Capaian IKU)	Peringkat	0	0
				15	Laboratorium/Perpustakaan/workshop/studio yang terakreditasi/Tersertifikasi	Persentase	0	0
			IKT	1	Sertifikasi/Akreditasi Unit Kerja dari pihak eksternal	Persentase	0	0
				2	Penambahan program studi baru	Jumlah	0	0
				3	Akreditasi Institusi	Peringkat	0	0
	IKU-8	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	IKK	1	Opini Penilaian Laporan Keuangan oleh Akuntan Publik	Opini	-	-
				2	Nilai SAKIP	Nilai	0	0

PENUTUP

Upaya pendirian Fakultas Kedokteran, Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Hewan sudah dilakukan sejak tahun 2018, sehingga segala persiapan sudah cukup matang, dimana UNP sudah melakukan perekrutan dosen dan tenaga kependidikan pada beberapa tahap. Sarana dan prasarana juga sudah dipersiapkan dengan matang, segala persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan standar KKI juga sudah terpenuhi.

Kurikulum Program Studi Kedokteran UNP sudah dirancang dengan menghadirkan pakar *Medical Education* yang berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia (SPPDI), Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI), Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK). Unggulan pada program studi kedokteran adalah manajemen risiko kesehatan bencana alam yang sudah dituangkan dalam visi dan misi Program Studi Kedokteran. Program Studi Kedokteran Hewan memiliki keunggulan pada pencegahan penyakit zoonosis dan keamanan pangan. Lulusan Program Studi Kedokteran dan Kedokteran Hewan UNP diharapkan memiliki kemampuan menjadi *leader* dalam berbagai kondisi bencana sekaligus menjadi edukator yang terampil, kreatif, inovatif dan kolaboratif. Keunggulan masing-masing prodi dapat dilihat pada matrik kurikulum tahap sarjana maupun profesi.

Renstra ini dibuat dalam rangka menyamakan visi, misi dan nilai-nilai dalam mewujudkan tujuan institusi pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Padang. Dalam menjalankan strategi untuk mencapai target maka sinkronisasi semua departemen, prodi dan unit. Beberapa tujuan strategis telah dirumuskan dengan cermat berdasarkan masukan dari berbagai pihak. Indikator juga telah disusun berdasarkan capaian renstra universitas dengan mengakomodasi data-data kinerja yang dievaluasi secara periodik dan berkelanjutan.

Selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara terstruktur, sistematis, periodik, dan berkelanjutan diharapkan mampu mengantisipasi adanya kendala dan kesalahan dalam implementasi program yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan institusi. Penjaminan mutu merupakan bagian yang sangat penting dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan. Universitas Negeri Padang sudah memiliki Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) yang sudah mempunyai dokumen, standar prosedur operasional, pelaksanaan audit mutu internal yang telah berjalan sangat baik dalam melakukan penjaminan mutu baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun Program Studi

Dengan demikian diharapkan semua target pada indikator pada renstra akan tercapai sesuai target per periode dan target keseluruhan pada tahun 2024 menyesuaikan dengan renstra UNP.